

Yenny

kalaupun viral tidak ada keadilan untuk orang yang menjadi korban," ungkap Ketua Panitia Haul ke-15 Gus Dur, Yenny Wahid di Jakarta, Sabtu (21/12).

Menurut Yenny, hal ini merupakan masalah yang serius yang harus segera diperbaiki. Sebagai warga negara yang taat membayar pajak dan mematuhi aturan, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara serta layanan publik yang terbaik.

Dalam hal ini, Yenny menginginkan aparat penegak hukum dapat merespons lebih cepat dalam merespons berbagai laporan dan aduan yang

mereka alami sebagai korban. Seringkali masyarakat harus turun tangan untuk menuntut keadilan ketika negara terlihat gagap dalam menyikapi situasi tersebut.

Meski demikian, Yenny mengapresiasi adanya kontrol masyarakat yang tetap aktif dalam mengkritisi ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. "Bagi saya, ini harus kita syukuri karena ada mekanisme kontrol masyarakat yang artinya masyarakat harus bergerak dan memang harus terus mengkritisi ketika ada ketidakadilan di sekeliling kita," jelasnya.

Terkait haul Gus Dur, Yenny mengatakan pada tahun ini mengang-

kat tema besar "Menajamkan Nurani Membela yang Lemah" yang menurutnya sesuai dengan kondisi saat ini. "Kita melihat konteks, kondisi masyarakat pada saat ini seperti apa yang kemudian coba kita ekspresikan dalam tema haul. Nah, pembelaan terhadap mereka yang lemah lalu juga penajaman nurani kita. Ini juga sebetulnya adalah sebuah pesan yang ingin kita sampaikan," kata Yenny Wahid sebelum acara haul ke-15 Gus Dur yang berlangsung di Kompleks Al-Munawaroh, Jalan Warung Silah 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12).

(Ant/Has)-f

Jadi

la juga berharap kerja sama dalam bidang pendidikan dengan Liga Muslim Dunia dapat diperluas, termasuk melalui pertukaran pelajar dan dukungan beasiswa. Hal itu dalam rangka percepatan dan pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia, khususnya dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

"Kami sangat berharap adanya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia, sehingga dapat menghadapi tantangan global

dengan SDM yang kompetitif," ujarnya.

Muzani menuturkan, kunjungan tersebut akan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendiskusikan langkah strategis dalam memajukan umat Islam di Indonesia maupun dunia. Ia juga menyampaikan penghargaan atas peran Liga Muslim Dunia dalam mempromosikan perdamaian global dan menyebarkan nilai-nilai toleransi.

Sementara itu, Al-Issa memuji Indonesia sebagai salah satu contoh baik negara yang sukses dalam men-

jaga keberagaman dan mempertahankan persatuan kebangsaan. Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tingkat global.

"Indonesia adalah contoh sukses bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk memelihara persatuan. Liga Muslim Dunia siap terus bekerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang strategis," ujarnya.

(Ant/San)-f

QRIS

menggunakan sistem pembayaran virtual tersebut, tidak akan dikenakan PPN 12 persen.

"Kalau ke sana pun (negara Asia lain) juga pakai QRIS dan tidak ada PPN. Jadi ini kami klarifikasi bahwa *payment system* tidak dikenakan PPN, karena ini kan transaksi, yang PPN adalah barang," ujar Menko Airlangga.

Hal yang sama juga berlaku untuk penggunaan e-toll. Transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya, e-toll juga tidak ada PPN.

Selain sistem pembayaran, Airlangga menyampaikan bahwa PPN juga tidak diberlakukan untuk bahan pokok. Bahan makanan seperti tepung terigu, minyak

goreng, minyak, dan gula industri bebas dari dampak kenaikan PPN. Tarif PPN 12 persen juga tidak dikenakan untuk tarif tol, sektor kesehatan, dan pendidikan, kecuali barang dan jasa khusus. "Kecuali yang khusus. Yang khusus nanti yang ditentukan," tegasnya.

Airlangga mengaku kenaikan PPN bukan 12 persen, melainkan hanya 1 persen dari sebelumnya 11 menjadi 12 persen. Ia mengakui memang akan ada dampak terhadap inflasi, namun, hal itu tidak terlalu besar dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. "PPN naik itu 1 persen, dari 11 ke 12, bukan dari nol ke 12. Jadi dari segi kenaikan ini pengaruh inflasi ada, tapi relatif tidak terlalu tinggi," tuturnya.

Sebelumnya, beredar isu transaksi uang elektronik bakal menjadi objek pajak yang dikenakan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari mendatang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menyebut pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983.

"Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Juli 1984, artinya bukan objek pajak baru," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.

(Ant/Has)-f

Ribuan

mengapresiasi tokoh-tokoh yang telah berdedikasi mengajak mantan anggota JI untuk beribadah yang sesungguhnya, yakni membela bangsa dan negara.

"Bersama dengan ini kami telah melakukan sosialisasi pembubaran Jamaah Islamiyah di berbagai titik di seluruh Indonesia. Kami telah menyaksikan bahwa mereka telah menunjukkan komitmen untuk sepenuhnya kembali ke NKRI," katanya, Sabtu (21/12).

Sentot mengatakan, deklarasi tersebut tidak hanya memberikan makna mendalam

pada komitmen mereka, tetapi juga menjadi simbol nyata sinergi pemerintah dan masyarakat untuk merawat persatuan dan keutuhan negara dan bangsa.

Ia menambahkan, dengan deklarasi tersebut, para mantan anggota JI datang dengan hati yang tulus dan berikrar kepada NKRI untuk ikut membangun negeri.

"Setiap orang memiliki masa lalu, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mantan anggota JI. Mereka telah menanggung konsekuensi atas perjalanan yang keliru pada masa lalu, termasuk dalam proses

hukum. Hal yang lebih penting, melalui proses refleksi dan kesadaran, sehingga kemudian menemukan kebenaran yang sejati," katanya.

Deklarasi pembubaran itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito, Kepala BNPT Irjen Polisi Eddy Hartono dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

(Ant/Obi)-f

Bencana

Bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami memiliki sifat yang sangat berbeda dengan bencana meteorologis seperti banjir dan longsor. Hingga saat ini, ilmu pengetahuan belum mampu memprediksi waktu dan lokasi gempa bumi secara presisi. Meski begitu, mitigasi gempa tetap dapat dilakukan, terutama melalui pembangunan bangunan tahan gempa dan pelatihan masyarakat untuk tanggap darurat.

Sementara itu, tsunami sebagai dampak dari gempa dapat diantisipasi melalui sistem peringatan dini (*early warning system*). Sistem ini memberi waktu belasan menit untuk evakuasi, meski keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan ruang evakuasi yang memadai di daerah pesisir.

Sebaliknya, bencana meteorologis lebih dapat diprediksi dengan teknologi modern.

Cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, dan potensi banjir dapat dideteksi jauh sebelumnya, memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk bersiap. Namun, akurasi prediksi tidak menghapus kebutuhan akan kesiapan dan kewaspadaan. Penanganan banjir dan longsor membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Kekhawatiran masyarakat sering kali diperburuk oleh informasi yang tidak

berdasar, seperti ramalan yang viral lewat media sosial tentang tsunami megathrust.

Ramalan seperti ini tidak memiliki landasan ilmiah dan hanya menimbulkan kepanikan. Sebagai perbandingan, sains selalu didasarkan pada data, pengamatan, dan metode yang terukur. Nabi Muhammad SAW bahkan memperingatkan agar umat Islam menjauhi peramal: "Barangsiapa bertemu peramal, lalu mempercayainya (mempercayai) ramalannya, maka ditolak sholatnya 40 hari." (HRAI Bukhari).

Oleh karena itu, ramalan yang tidak didukung oleh sains, sekalipun dibungkus dengan kutipan kitab suci, sebaiknya diabaikan.

Sebagai negara rawan bencana, Indonesia harus memprioritaskan mitigasi berbasis sains. Untuk gempa bumi, pembangunan bangunan tahan gempa harus menjadi standar, terutama di daerah dengan risiko tinggi. Pelatihan rutin bagi masyarakat untuk menghadapi gempa juga sangat penting.

Sedangkan untuk tsunami, penguatan sistem peringatan dini dan penyediaan infrastruktur evakuasi yang memadai di pesisir adalah langkah mutlak.

Dalam menghadapi bencana meteorologis, edukasi dan sosialisasi tentang tanda-tanda bahaya serta langkah pencegahan harus terus digalakkan. Pemerintah juga

perlu meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul, drainase, dan pengelolaan ruang hijau.

Momen akhir tahun ini seharusnya menjadi pengingat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana, bukan untuk menyebarkan ketakutan berdasarkan ramalan tanpa dasar ilmiah. Dengan memadukan sains, edukasi, dan koordinasi yang baik, masyarakat Indonesia dapat lebih tanggap menghadapi berbagai ancaman bencana.

Yang terpenting, tetaplah berpegang pada ilmu pengetahuan dan menjauhi spekulasi. Karena hanya dengan pendekatan rasional kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang mungkin terjadi. Sebagaimana tsunami Aceh 2004 mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan alam, mari kita juga belajar untuk selalu mengutamakan sains dan logika dalam setiap langkah mitigasi bencana.

Pada saat yang sama kita juga wajib merekatkan kohesi sosial agar siap saling menolong saat terjadi bencana. Juga terus meningkatkan iman dan taqwa, sehingga jika terkena bencana kita tetap bersabar, dan jika terhindar dari bencana, kita siap membantu mereka yang terkena musibah.

(Penulis adalah peneliti Geoinformatika Multidisiplin, BRIN)-f

JAGA MOBILITAS PELANGGAN Toyota Posko Siaga dan Toyota Bengkel Siaga



KR-Istimewa

Kesiapan Tim Layanan Pelanggan Toyota.

JAKARTA (KR) - PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali mengadakan program tahunan Toyota Posko Siaga di 5 titik pelayanan servis selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 untuk memberikan rasa tenang dan nyaman kepada pelanggan selama perjalanan wisata. Selain itu, 300 Toyota Bengkel Siaga tetap beroperasi normal di hari libur Nataru, untuk membantu pelanggan yang memerlukan servis berkala dan perbaikan kendaraan. Layanan Siaga Toyota ini beroperasi 21 Desember 2024-1 Januari 2025.

Marketing Director PT TAM

Anton Jimmi Suwandhy mengatakan, untuk memberikan total mobility solution, Toyota juga menghadirkan konversi All New Hilux Rangka untuk mendukung mobilitas dan services bagi pelanggan Toyota. "Toyota selalu berusaha menawarkan solusi terbaik dan menyeluruh bagi pelanggan," ujarnya.

Dijelaskan, untuk memberikan kemudahan servis berkala, Toyota menghadirkan program T-CARE dalam bentuk bebas biaya jasa (*free labor*) dan suku

cadang (*free parts*) sampai dengan servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun/60.000 km) beserta keuntungan perpanjangan Toyota Warranty (*Extended Warranty*) 1 tahun/20.000 km, dengan catatan pelanggan rutin servis berkala 6 bulan sekali di bengkel resmi Toyota.

Menurut Anton, pemilik LCGC disediakan opsi dua program, yakni T-CARE Lite dan T-CARE Lite+. T-CARE Lite merupakan program bebas biaya jasa (*free labor*) sampai dengan servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun/60.000 km). Sementara T-CARE Lite+ merupakan paket hemat tambahan suku cadang dari servis berkala ke-2 sampai ke-7 (maksimal 3 tahun/60.000 km) khusus untuk LCGC. Keuntungan perpanjangan Toyota Warranty (*Extended Warranty*) 1 tahun/20.000 km, tetap dapat dimanfaatkan oleh pelanggan dengan syarat sama, rutin servis berkala.

Pemilik mobil Toyota juga dapat melakukan general check-up kendaraan secara gratis di Toyota Posko Siaga yang beroperasi 24 jam. (Rsv)-f

312

Sambungan hal 1

"Namun tingginya perkara ini juga bisa diartikan ada permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari sisi pelaksanaan, administrasi maupun pengawasan, yang kemudian berpengaruh pada persepsi publik terhadap keadilan hasil pilkada," jelasnya.

Pada bagian lain Perlutem mencatat permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota atau sengketa Pilkada 2024 yang paling banyak diajukan ke MK berasal dari wilayah Indonesia bagian timur.

"Wilayah paling tinggi berasal dari wilayah Indonesia Timur," kata Ajid Fuad Muzaki.

Menurutnya, dari 10 besar provinsi dengan permohonan sengketa Pilkada 2024 tertinggi yang masuk ke MK, tujuh provinsi di antaranya merupakan wilayah di Indonesia bagian timur. Di mana, urutan tiga teratas ditempati Papua Tengah sebanyak 20 perkara, Maluku Utara 19 perkara dan Papua 18 perkara.

Urutan selanjutnya secara berturut-turut

ditempati Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Maluku.

Distribusi jumlah perkara yang masuk ke MK, katanya, menunjukkan, daerah-daerah dengan kompleksitas geografis dan tingkat partisipasi politik tinggi memiliki potensi sengketa yang lebih besar. Sementara wilayah dengan jumlah perkara sengketa Pilkada 2024 yang paling sedikit diajukan ke MK ialah Provinsi Kalimantan Barat (satu perkara), Nusa Tenggara Barat (satu perkara), dan Kalimantan Utara (dua perkara).

Berikutnya, Provinsi Banten, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat, dengan masing-masing tiga perkara sengketa Pilkada 2024 yang masuk ke MK. Kemudian, terdapat dua provinsi yang tidak memiliki permohonan sengketa Pilkada 2024 di MK, yakni DI Yogyakarta dan Bali. (Ant/Obi)-f

Gerindra-

Sambungan hal 1

(HPP) merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan termasuk diinisiasi PDIP.

Dalam keterangan persnya, Minggu, legislator Fraksi Gerindra itu membenarkan, Panja membahas kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP saat itu diketuai Fraksi PDIP. Untuk itu, ia menilai sikap PDIP saat ini terhadap penerapan kebijakan PPN 12 persen sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

"Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin Panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP meminta ditunda ini adalah sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto," ucap anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ia mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak gegangirung isu, kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebab kebijakan itu menjadi payung hukum yang diputuskan PDIP pada periode 2019-2024.

"Jadi apabila sekarang ada yang mengkaitkan dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar,

yang benar adalah UU ini produk DPR yang pada saat itu diinisiasi PDIP dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan," ucapnya.

Sebaliknya, ia menilai sikap PDIP saat ini seperti upaya 'melempar bola panas' kepada pemerintahan Presiden Prabowo, padahal kenaikan PPN 12 persen yang termaktub dalam UU HPP meru-

upakan produk DPR periode sebelumnya.

Ia pun menegaskan, Presiden Prabowo sedianya sudah "menguliki" kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, salah satunya dengan menerapkan kenaikan PPN tersebut dikenakan terhadap barang-barang mewah. (Ant)-f



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95

☀ Cerah ☁ Berawan 🌫 Udara Kabur 🌧 Hujan Lokal 🌧 Hujan Pelir

Gratis - Arko



Yusuf Amri Amrullah, SE MM
Dosen Prodi S-1 kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta

PDCA Yang Terlupakan : Pentingnya Evaluasi untuk Bisnis UMKM



Creative Economy Park

DALAM dunia bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), metode PDCA (Plan-Do-Check-Act) sering kali dianggap sebagai salah satu alat manajemen yang efektif. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang

cenderung melupakan atau mengabaikan tahap "Check" atau "Evaluasi". Padahal, tahap ini sangat krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis.

Apa itu PDCA?
PDCA adalah siklus manajemen yang terdiri dari empat tahap:

1. Plan (Perencanaan): Menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Do (Pelaksanaan): Melaksanakan rencana yang telah dibuat.
3. Check (Pemeriksaan): Mengevaluasi hasil dari pelaksanaan rencana.
4. Action (Tindakan): Mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan

berkelanjutan. Mengapa Tahap "Check" atau "Evaluasi" Sering Terlupakan?

Banyak pelaku UMKM yang fokus pada perencanaan dan pelaksanaan, namun kurang memberikan perhatian pada evaluasi. Beberapa alasan umum meliputi:

1. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya: Pelaku UMKM sering kali terjebak dalam rutinitas operasional sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk melakukan evaluasi.
2. Kurangnya Pemahaman: Tidak semua pelaku UMKM memahami pentingnya evaluasi dalam siklus PDCA.
3. Kepuasan Diri: Ketika hasil awal terlihat memuaskan, pelaku UMKM mungkin merasa tidak perlu melakukan evaluasi lebih

lanjut. Pentingnya Tahap "Check" atau "Evaluasi" untuk UMKM

1. Mengidentifikasi Kelemahan dan Kesalahan: Evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan dalam pelaksanaan rencana, sehingga dapat diperbaiki sebelum menjadi masalah besar.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Dengan mengevaluasi hasil, pelaku UMKM dapat menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
3. Menjamin Kepuasan Pelanggan: Evaluasi memungkinkan pelaku UMKM untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan.

4. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis.

Cara Melakukan Evaluasi yang Efektif

1. Tetapkan Indikator Kinerja: Tentukan indikator kinerja utama (KPI) yang relevan dengan tujuan bisnis.
2. Kumpulkan Data Secara Berkala: Lakukan pengumpulan data secara rutin untuk memantau kinerja.
3. Analisis Data: Gunakan alat analisis yang sesuai untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan.
4. Tindak Lanjut: Berdasarkan hasil evaluasi, buat rencana tindakan untuk perbaikan dan

implementasikan dalam siklus PDCA berikutnya.

Secara umum evaluasi yang bisa dilakukan oleh UMKM jika belum memiliki KPI yang terukur dapat bisa melakukan evaluasi apda capaian omset dan laba, pada tahap ini yang bisa dievaluasi meliputi: Apakah pasar atau segment yang dilakukan sudah sesuai? Apakah cara memasarkan sudah sesuai dengan pasar yang disasar? Apakah produk yang dimiliki perlu disesuaikan dengan pasar yang ada? Meliputi: Jenis produk itu sendiri? Ukuran produk? Harga? atau bisa dilakukan riset berdasarkan preferensi pelanggan.

Nah riset ini wajib dilakukan secara terus menerus oleh pelanggan, dan sekali lagi RISET

menjadi kegiatan yang WAJIB dilakukan oleh pelaku bisnis. Riset juga bisa dilakukan dengan melakukan analisis pesaing, secara umum riset meliputi 4 hal yaitu: produk, harga, media pemasaran dan tempat memasarkan produk. Akan tetapi ke-4 hal tersebut bisa jadi berubah, MENGAPA? Yaitu karena perilaku konsumen yang akan mempengaruhi preferensi pelanggan berdasarkan pengalaman mereka membeli sebuah produk.